

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KOTA MAKASSAR

Darwis Muhdina

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email: darwismuhdina@yahoo.com

Abstrak : Keragaman masyarakat Makassar yang terdiri atas berbagai etnis dan ras seperti Jawa, Cina, Arab, Ambon, India/Pakistan, dan Bugis Makassar sendiri) menjadi potensi untuk membangun kekuatan dan keharmonisan kehidupan masyarakat Makassar. Keragaman ini, selain merupakan perbedaan, juga dapat mewujudkan kompetisi, juga di dalamnya terdapat budaya-budaya lokal yang menjadi perekat dalam hidup bermasyarakat, layak dan sejahtera lahir dan bathin, demikian yang diajarkan dalam agama masing-masing. Terminologi yang digunakan oleh pemerintah secara resmi, konsep kerukunan hidup umat beragama mencakup 3 kerukunan, yaitu: (1) kerukunan intern umat beragama; (2) kerukunan antarumat beragama; dan (3) kerukunan antarumat beragama dengan Pemerintah. Tiga kerukunan tersebut biasa disebut dengan istilah Trilogi Kerukunan. Kearifan lokal di Kota Makassar yakni Sipakatau, Sipakalebbi serta adanya budaya siri' menjadi perekat kerukunan umat beragama, oleh karena itu perlu dilestarikan. Kearifan lokal tersebut memberi kontribusi besar terhadap terciptanya kerukunan umat beragama di Kota Makassar.

Keywords : Kerukunan - Kerifan Lokal - Agama

I. Pendahuluan

Menteri Agama Republik Indonesia dalam pidato pembukaan Musyawarah Antaragama menyampaikan harapannya kepada peserta sebagai berikut: "Adanya kerukunan antargolongan beragama merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang menjadi program Kabinet AMPERA. Oleh karena itu, kami mengharapkan sungguh adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat beragama untuk menciptakan iklim kerukunan beragama ini, sehingga tuntutan hati nurani rakyat dan cita-cita kita bersama ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang dilindungi Tuhan Yang Maha Esa itu benar-benar dapat berwujud.¹

¹Menteri Agama, K.H. M. Dachlan, dalam pidato pembukaan *Musyawarah Antaragama* tanggal 30 November 1967 di Jakarta.

Kerukunan umat beragama yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Keragaman masyarakat Makassar yang terdiri atas berbagai etnis dan ras seperti Jawa, Cina, Arab, Ambon, India/Pakistan, dan Bugis Makassar sendiri) menjadi potensi untuk membangun kekuatan dan keharmonisan kehidupan masyarakat Makassar.

Keragaman ini, selain merupakan perbedaan, juga dapat mewujudkan kompetisi, juga di dalamnya terdapat budaya-budaya lokal yang menjadi perekat dalam hidup bermasyarakat, layak dan sejahtera lahir dan bathin, demikian yang diajarkan dalam agama masing-masing. Konsep Pluralisme sebagai sebuah ajaran yang mengajarkan keberagaman dalam berkeyakinan, menghargai dan menghormati orang yang berbeda agama sudah semestinya menjadi pemahaman orang-orang beragama. Dengan tujuan terciptanya keharmonisan, ketenteraman dalam realitas sosial yang penuh dengan keberagaman untuk mewujudkan negara yang merdeka secara totalitas. Seorang beragama mempunyai faham yang berbeda dengan orang yang bergama lain, penganut agama tersebut harus tetap pada pendiriannya masing-masing. Seseorang sebaiknya memahami agamanya dengan baik dan menghormati keberadaan agama lain.

Prinsip di atas harus dipegang teguh oleh semua umat beragama terutama yang beragama Islam, dan harus difahami dengan sebaik-baiknya, karena dengan pemahaman yang baik dan benar terhadap ajaran agama dapat menciptakan saling menghargai dan saling menghormati.

Seiring dengan dinamika kehidupan yang terus berkembang, dan semakin kompleksnya persoalan kerukunan maka fokus sekarang lebih diarahkan pada perwujudan rasa kemanusiaan dengan pengembangan wawasan multikultural serta dengan pendekatan terhadap masyarakat, komunikatif dan terbuka, tidak saling curiga, memberi tempat terhadap keragaman keyakinan, tradisi, adat maupun budaya.

II. Gambaran Kerukunan Umat Beragama di Kota Makassar

Upaya menciptakan kerukunan umat beragama yang lebih baik di Kota Makassar khususnya, memang diperlukan perhatian semua pihak, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah dan semua lapisan masyarakat harus secara bersama melaksanakan program masing-masing agama. Dengan

² Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Um.it Beragama, dan Pendirian rumah Ibadat.

demikian, maka bentuk kerukunan antarumat beragama hanya dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama demi kepentingan bersama.

Masyarakat beragama harus saling bicara satu dengan yang lain dengan jalan yang akan bisa membawa mereka tidak hanya pada pemahaman dan aspek yang lebih besar, tetapi juga pada kerja sama. Sebaiknya, ada suatu dialog antaragama, yang akan memfasilitasi tidak hanya toleransi antaragama tetapi juga aksi antaragama, yang mana tidak hanya kemampuan untuk hidup bersama, tetapi juga untuk bekerja sama dalam merubah dunia ini.³

Kerukunan umat beragama di wilayah Makassar boleh dikatakan sudah cukup baik. Sampai saat ini saya belum pernah melihat adanya konflik antarumat beragama, malah yang terjadi adalah kerukunan, meskipun sering terjadi permasalahan mengenai pendirian tempat ibadah, namun itu hanya bersifat sementara dan cepat teratasi. Selain itu, semua lini kehidupan beragama berjalan normal dan terkendali. Sebenarnya banyak kegiatan yang bisa diprogramkan untuk mempererat kebersamaan antarumat beragama seperti seminar-seminar, perayaan hari-hari besar antaragama.⁴

Pendapat saya, mengenai kerukunan umat beragama di Kota Makassar, dari pandangan Islam adalah kita sebagai manusia yang hidup bersosialisasi di negara yang banyak perbedaan seperti suku, ras, budaya, maupun agama, haruslah memiliki sifat toleransi untuk menghindari perpecahan antara satu orang dengan lainnya, maupun sekelompok orang dengan kelompok lainnya.

Kerukunan antarumat beragama itu sangat penting, karena jika kita selalu bertengkar antara satu sama lain hidup kita akan tidak nyaman dan tidak aman. Kita tidak boleh membanding-bandingkan dengan orang lain tentang agama siapa yang paling benar karena itu akan menimbulkan perpecahan di antara kita. Upaya meningkatkan pemahaman keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk generasi muda adalah suatu hal yang penting. Baru-baru ini di Makassar telah diadakan dialog dan seminar pemuda antaragama dan telah menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

Selanjutnya, siap menerima perbedaan dengan saling menghormati dan melawan rasisme serta diskriminasi mulai dari diri sendiri. Ketua Pelaksana IMYA 2013, Naskar Furiousan Hansam mengatakan, prinsip dasar saling toleransi ini sangat dibutuhkan bangsa yang majemuk seperti Indonesia. Karenanya, pihaknya berharap kepada 80 peserta lintas agama dari delegasi Indonesia, Malaysia, Kamboja, Pakistan, Afganistan dan sejumlah Negara Timur Tengah ini menularkan rekomendasi yang mereka capai.

Agama apa pun kita, harus membangun toleransi antarumat. Sebab terayata semua agama, baik Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Buddha dan lainnya tidak menganjurkan kekerasan," kata Naskar, Sabtu 28 September. Pemateri dari lintas agama juga menyampaikan itu dalam presentase mereka. Begitupun yang didapatkan peserta tatkala mengunjungi langsung Pura

³ Journal of Religious Issues (Yogyakarta: UGM, 2003) h. 129.

⁴Wawancara dengan Seprianto agan (Pemeluk Kristen) tanggal 28-Juni 2012 di Makassar.

Girinata, Gereja Katedral, Masjid Al Markas Al Islami, Klenteng Ibu Agung, GPffi Immanuel dan Vihara Rama Buddha. Pihaknya berharap dialog pemuda lintas agama seperti ini ke depan lebih dikembangkan di Makassar dan daerah lainnya. Terutama yang melibatkan pemuda, tokoh agama, akademisi dan cendekia yang memang memahami konteks keberagaman sebagai keniscayaan di muka bumi Kota Makassar sebagai sebuah pusat peradaban di Indonesia Timur tak lepas adari berbagai sorotan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat, dan menjadi pusat pendidikan. Demikian juga kehidupan umat beragama yang perlu tetap dipelihara agar supaya dapat hidup tenteram dan damai.

Kita bersyukur sejauh ini Makassar belum terkontaminasi menjadi Kota yang anti toleransi beragama. Konflik-konflik yang sering terjadi umumnya dilatarbelakangi faktor ekonomi, fanatisme kedaerahan atau organisasi serta alasan-alasan nonreligious lainnya. Kekerasan atas nama agama dapat mengancam keuruhan berbangsa. Ketika sudah mengatasnamakan agama, penganut, terutama aliran tertentu, akan bersedia mengorbankan apa pun termasuk nyawa.

Semua agama mengajarkan pentingnya perdamaian. Setidaknya ini yang saya dapat ketika mengikuti International Multifaith Youth Assembly 2013 selama empat hari lalu. Pada hari ketiga, peserta yang berasal dari berbagai agama dan negara mengunjungi tempat-tempat ibadah berbagai agama. Kami berkunjung ke Pura Giri Nata (Hindu), Gereja Katedral (Katholik), Klenteng Ibu Agung Vihara (Konghucu), Al Markas Al Islam (Islam), Gereja Immanuel (Kristen Protestan), dan Vihara Arama Buddha (Buddha). Kami juga berdialog tentang toleransi dengan pimpinan serta penganut agama terkait. 'Selain itu, kami juga berdialog informal dengan sesama peserta dan pemuka agama lain yang berbeda agama.'⁵

Kerukunan umat beragama di Makassar pada dasarnya sudah mengalami kemajuan. Kerukunan merupakan kebutuhan bersama yang tidak dapat dihindarkan di tengah perbedaan. Perbedaan yang ada bukan merupakan penghalang untuk hidup rukun dan berdampingan dalam bingkai persaudaraan dan persatuan. Kesadaran akan kerukunan hidup umat beragama yang harus bersifat dinamis, humanis, dan demokratis, agar dapat ditransformasikan kepada masyarakat di kalangan bawah.⁶

Demikian juga yang dikemukakan bahwa; "Kerukunan umat beragama di Kota Makassar, sebenarnya sudah berjalan dengan baik dan lancar, dimana kita sering membangun silaturahmi dengan baik dan intens. Benturan yang prinsip boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi antara umat beragama. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama cukup baik, dan membentuk keterwakilan tokoh masing-masing agama."⁷

⁵ Arifuddin, Mari Merayakan Perbedaan, *harian Tribun Timur*, 3 Oktober 2013

⁶ Wawancara dengan Drs. KH. Muhammad Ali, Oktober 2013 di Makassar

⁷ Wawancara dengan Simon Kendak Paranta, Bimas Hindu Kementerian Agama Prof. Sul-Sel 26 Mei 2014 di Makassar

"Kerukunan umat bergama di Kota Makassar itu sudah berjalan dengan baik, aman, dan kondusif tidak ada gerakan yang menonjol. Kalau ada yang terjadi ditengah-tengah masyarakat itu hanya merupakan oknum. Contoh yang pernah terjadi beberapa bulan yang lalu; "Pelemparan Gereja" pelaku tersebut, itu hanya oknum bukan atas nama suatu agama tertentu. Kalau ada terjadi seperti itu maka, lembaga atau tokoh masing-masing agama cepat tanggap untuk menyelesaikan persoalan tersebut sehingga tidak berlarut-larut. Hal tersebut bisa dicapai oleh karena sering ada komunikasi antara tokoh agama."⁸

Demikian juga yang dikemukakan bahwa; kerukunan umat beragama di Kota Makassar ini, sudah berjalan dengan cukup baik. Kalau ada masalah atau riak-riak kecil, bisa diselesaikan dengan baik dan cepat. Demikian hasil penelitian dari beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, bahwa di Kota Makassar kerukunan hidup umat beragama berjalan dengan baik.

III. Peran Pemerintah dalam Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Kota Makassar

Tugas pokok Departemen Agama sebagai salah satu departemen di bidang kesejahteraan rakyat di mana unsur pelayanan kepada masyarakat lebih menonjol daripada unsur pemerintah, maka selanjutnya pemeliharaan kerukunan umat beragama menggunakan pendekatan praktis-pragmatis yaitu tidak lain untuk melayani masyarakat agar kehidupan keagamaan semakin semarak, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat.

Terminologi yang digunakan oleh pemerintah secara resmi, konsep kerukunan hidup umat beragama mencakup 3 kerukunan, yaitu: (1) kerukunan intern umat beragama; (2) kerukunan antarumat beragama; dan (3) kerukunan antarumat beragama dengan Pemerintah. Tiga kerukunan tersebut biasa disebut dengan istilah "Trilogi Kerukunan".⁹

Kerukunan umat beragama yang dimaksud adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

⁸ Wawancara dengan Antonius Yunanto Untung Nugroho, 26 Mei 2014 di Makassar

⁹ Alamsyah Ratu Perwira negara, *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, (Jakarta: Departemen Agama, 1982), h. 12

¹⁰ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian rumah Ibadat.

Peran Pemerintah Kota Makassar terhadap kerukunan antarumat beragama di antaranya:

1. Membuka dialog atau diskusi antarumat beragama.
2. Seminar-seminar atau talk show yang menghadirkan para alim ulama atau tokoh masing-masing agama.
3. Memberikan kebebasan kepada warga untuk beribadah tanpa mengusik mereka sesuai dengan kepercayaan yang dianut.
4. Meredam segala cikal bakal dan benih-benih yang dapat membuat antarumat beragama berseteru.

Naskah sosialisasi oleh pemerintah dengan adanya keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Dan yang terakhir PBM Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 3/2008, KEP-033/JA/2008 dan Nomor 1990 Tahun 2008.

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor.9 dan Nomor. 8 Tahun 2006 tersebut di atas, terkait pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pendirian Rumah Ibadah. Sesungguhnya oleh Pemerintah adalah bermaksud untuk mengarur. Namun oleh sebagian pemeluk agama mungkin ada yang menilai bahwa Pemerintah tidak adil, atau mempersulit pemeluk agama yang mau mendirikan Rumah Ibadah lantas tidak diberikan izin untuk membangun. Pemeluk agama yang berbeda-beda sekte dan aliran, masing-masing mau mendirikan Rumah Ibadah sendiri. Peraturan Pemerintah tersebut di atas pada masa yang akan datang mungkin masih perlu ditinjau ulang, namun kondisi sekarang ini masih bisa dianggap sudah memadai. Oleh karena itu bagi masyarakat sebaiknya mematuhi aturan tersebut, supaya dapat hidup tenteram dan dapat memelihara terciptanya Kerukunan Umat Beragama khususnya di Kota Makassar.

Beberapa hasil penelitian yang dilaksanakan Puslitbang Kehidupan Keagamaan, hasil penelitian ini memiliki nilai guna yang tinggi sehingga perlu disosialisasikan secara lebih luas. Hasil penelitian ini juga telah disosialisasikan pada forum yang bertaraf nasional setidaknya 3 kali. Pertama: Sosialisasi pada forum Kongres Pemuka Agama yang dilaksanakan oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekertariat Jenderal Departemen Agama tanggal 7-9 Desember 2009 di Jakarta. Kedua: Sosialisasi pada seminar dalam rangka memperingati Hari Amal Bhakti Departemen Agama yang dilaksanakan tanggal 14 Desember 2009. Dan terakhir atau yang ketiga: adalah Sosialisasi pada forum rapat Koordinasi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri tanggal 25-27 Mei 2010 bertempat di Hotel Sahid Jaya Jakarta.¹¹

¹¹ Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kementerian Agama, *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama*; Dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan

Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama melaksanakan kegiatan-kegiatan mengenai kerukunan hidup antarumat beragama, baik melalui diskusi ataupun dialog dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat maupun lewat penelitian yang dilaksanakan oleh Puslitbang Departemen Agama Pusat, maupun tingkat wilayah dan tingkat daerah.

Demikian juga dikemukakan oleh seorang tokoh Budha di Kota Makassar bahwa; perhatian Pemerintah Kota Makassar terhadap kerukunan umat beragama, berjalan cukup baik, dimana Pemerintah Kota memberi bantuan-bantuan sosial, pembinaan kepada sekolah Minggu, bantuan ke Vihara-Vihara, ke lembaga keagamaan, ke guru sekolah Minggu, dan pembinaan kepada guru-guru non PNS dan lain-lain.¹²

Pemerintah sebagai pengayom masyarakat secara keseluruhan, tanpa membedakan suku, ras, dan agama, senantiasa dapat menjalankan dengan baik di Kota Makassar. Hal tersebut disampaikan oleh Hasan sebagai berikut:

Keseriusaan pemerintah terhadap pembinaan kerukunan hidup umat beragama di Makassar adalah terbentuknya Forum kerukunan umat beragama, yang dalam kepengurusannya ada keterwakilan dari setiap agama di Kota Makassar, misalnya dari agama Islam, agama Kristen, agama Budha, agama Hindu dan Konghutsu . Dalam setiap kegiatannya diundang seluruh potensi anggota masyarakat yang ada di Kota Makassar. Dalam bentuk kerja sama dengan pemerintah Kota Makassar ada kegiatan dengan mengundang Imam Kelurahan, para Kepala Kelurahan dan Kepala Wilayah Kecamatan se- Kota Makassar . Di samping itu, ada kegiatan khusus mengenai kerukunan umat beragama dengan para generasi muda dengan bentuk dialog dan diskusi.¹³

Perhatian pemerintah terhadap kerukunan umat beragama di Kota Makassar menurut salah seorang tokoh Hindu bahwa; selama ini kontribusi pemerintah sudah cukup baik, termasuk bantuan secara-finansial terhadap umat beragama. Dalam perayaan Hari Besar Agama Islam misalnya, umat kami mengadakan kunjungan berupa "Simakrama" yang dalam bahasa Islamnya adalah silatoffahim. Pada acara hari Nyepi kami mengadakan yang namanya "Ogogo" artinya symbol keraksasaan dan ketidak baiknya sifat manusia, hal ini diadakan supaya manusia dapat menyadari kelemahannya, keegoannya. Dengan demikian diharapkan ajaran "toleransi" berjalan dengan baik, ajaran toleransi dapat memperkuat terciptanya kerukunan umat beragama.

Salah seorang tokoh Kristen mengemukakan bahwa; perhatian pemerintah terhadap umat beragama di Kota Makassar ini sudah berjalan dengan baik, bantuan dan fasilitas lain itu boleh dikatakan sudah berjalan juga

Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. (Get. Pertama, Jakarta: Pen; Maloho Jaya Abadi Press, 2010).

¹² Wawancara dengan Ni Nyoman Ariyati (Tokoh Budha, Karyawan Bimas Budha Kanwil Sulawesi Selatan) pada tanggal 22. 05. 2014 di Makassar.

¹³Wawancara dengan Hasan S. Ag. Oktober 2013 di Makassar.

dengan baik. Yang terkadang menjadi persoalan adalah pendirian rumah ibadat, itupun yang terkadang menjadi soal adalah lingkungan sekitar rencana pembangunan rumah ibadat tersebut. Kalau terkait dengan perizinan, sudah berjalan hanya belum sesuai harapan dari kami.¹⁴

Perhatian pemerintah terhadap umat beragama di Kota Makassar sudah ada perubahan dan peningkatan, mengenai pendirian rumah ibadat misalnya itu sudah berjalan. Bantuan dan pembinaan terhadap tenaga Penyuluh Non PNS, ini sangat membantu bagi kami karena, penyuluh itu merupakan corong informasi, di Kota Makassar ini sudah sekitar 20 orang.

Perhatian pemerintah terhadap kerukunan hidup umat beragama di Makassar, sudah barang tentu banyak hal yang telah dilaksanakan dengan baik, namun masih banyak pula hal lain yang perlu dibenahi bersama dengan seluruh umat beragama bahkan semua warga masyarakat Kota Makassar.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Tugas FKUB kabupaten/Kota sebagaimana dalam pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:

1. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
2. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat
3. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/waliKota;
4. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
5. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.¹⁵

Terkait memberikan rambu-rambu dalam pengelolaan kerukunan umat beragama, pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antarumat beragama, baik yang berhubungan dengan hak dan kebebasan beragama, penyebaran ajaran agama, dan interaksi sosial di antara mereka.

Pemerintah Kota Makassar memberikan bantuan kesejahteraan bagi para guru sekolah Minggu Kristen dan sekolah Hindu. Mereka sejauh ini berpartisipasi aktif dalam hal pembinaan keagamaan. Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, mengungkapkan, penyerahan bantuan yang dilakukan ini, diharapkan mampu meningkatkan semangat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Juga sebagai salah satu upaya menjalin silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat khususnya para guru sekolah Minggu Kristen dan Hindu.

Kegiatan ini pun sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah Kota Makassar kepada kelompok masyarakat yang berorientasi dalam meningkatkan nilai spiritual masyarakat khususnya bagi umat Kristen dan

¹⁴ Wawancara dengan Antonius Yunanto Untung Nugroho, 26 Mei 2014 di Makassar

¹⁵ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 T.ihun 2006 pasal 9 ayat 2.

Hindu. Ujar Ilham dalam penyerahan bantuan secara simbolis di ruang pola Balai Kota Makassar. Ilham mengatakan, para guru sekolah Minggu Kristen dan Hindu tersebut, selama ini telah mengabdikan dirinya pada masyarakat dalam bidang pembinaan keagamaan yang tersebar dalam wilayah Kota Makassar. Wujud apresiasi Pemkot diberikan dalam bentuk sumbangan, walaupun nilainya tidak besar.

Pemberian dana kesejahteraan tersebut, merupakan langkah maju bagi pemerintah Kota Makassar, karena hal ini belum dilaksanakan oleh daerah lain di Sulawesi Selatan. Ia mengaku, Pemkot Makassar merupakan salah satu daerah yang melakukannya. Jangan lihat dari jumlah dana yang diterima, melainkan mari kita berdoa semoga kegiatan ini dapat terus berlanjut di setiap tahunnya.

Selain itu, Ilham juga mengajak kepada seluruh warga Kota Makassar agar tetap konsisten dalam menjaga toleransi sesama umat beragama, demi menciptakan situasi yang kondusif, aman, tenteram, dan damai. Dengan tercapainya situasi yang demikian, seluruh program pembangunan yang telah diagendakan tentunya dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kegiatan yang dilakukan oleh Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin di atas, merupakan kegiatan yang positif dan perhatian pemerintah terhadap warganya sekalipun berbeda agama. Hal tersebut diharapkan dapat berlanjut, supaya seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan bantuan tersebut.

IV. Sinergitas Kearifan Lokal terhadap Kerukunan Hidup Umat Beragama di Kota Makassar

Apabila kita mau mencari sumber kearifan lokal maka didapati pada, penjelasan pasal 32 UUD 1945 menyatakan makna kebudayaan nasional dan sekaligus menguraikan posisi kebudayaan daerah, yang berbunyi sebagai berikut: Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan nasional. Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan, adab, budaya, dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa.

Sesungguhnya masyarakat Indonesia di seluruh pelosok tanah air termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan, telah memiliki sejumlah kearifan lokal yang telah mampu menjadi penopang kerukunan umat beragama di daerah masing-masing. Kearifan-kearifan lokal itu telah berfungsi secara baik selama bertahun-tahun bahkan mungkin ratusan tahun di dalam lingkup komunitas tradisional mereka. Mungkin sebagian kearifan-kearifan lokal itu akan bertahan dan tetap berfungsi dengan baik, akan tetapi kita juga melihat bahwa sebagian kearifan-kearifan lokal itu juga ternyata tidak mampu bertahan.

Kalau kita hanya menganalkan kepada kearifan-kearifan lokal itu, maka boleh jadi di beberapa tempat kearifan lokal itu tidak akan dapat bertahan dan berfungsi lagi dengan baik. Karena itu, diharapkan kepada para pemuka agama dan tokoh masyarakat, termasuk pada tokoh adat, unruk terns

berupaya melahirkan kearifan-kearifan lokal yang baru yang dibicarakan bersama dan disepakati bersama guna memelihara kerukunan umat beragama. Kearifan-kearifan lokal baru itu dapat berbentuk pertemuan-pertemuan antarpemeluk agama, antarlintas perauda secara rutin di wilayah masing-masing di dalam memelihara keutuhan masyarakat dan bangsa.¹⁶

Harus diakui bahwa sudah banyak kearifan lokal yang dulunya dilaksanakan dengan baik di tengah-tengah masyarakat, sekarang ini tidak mampu lagi dipertahankan atau difungsikan dengan baik. Seorang Sasterawan D. Zawawi mengemukakan sebagai berikut:

Pada perjalanan sejarah, badik mengalami transformasi. Senjata khas untuk suku Bugis- Makassar, sejatinya memiliki makna yang lebih maju sebagai nilai-nilai universal. Badik memang memiliki dua sisi pemaknaan. Selain sebagai benda fisik yang difungsikan sebagai senjata, juga sebagai sumber nilai yang menjadi pengontrol dalam kehidupan setiap individu Bugis Makassar. Dalam badik, ada siri', yakni nilai kearifan lokal tentang harga diri dan malu:

Seseorang yang telah mampu merevitalisasi makna badik dalam bentuk nilai, akan menjadikannya sebagai sumber kebaikan berupa tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum, adat, dan keseluruhan nilai peradaban masyarakat Sulawesi Selatan. Dulu, badik memang lebih banyak digunakan untuk kepentingan pertarungan atau perkelahian. Namun, badik kemudian direkonstruksi maknanya menjadi nilai moral yang akan menjadi pijakan dalam bertindak, terutama ketika berinteraksi dengan sesama manusia. Badik itu hanya benda, tetapi ruhnya adalah siri'. Ruh siri' yang lebih dalam adalah "*ati macinnong*" (hati jernih).

Banyak nilai yang dilahirkan dari ruh badik tersebut, misalnya toddopuli, sipakatau, sipatokkong, sipakalebbi, , dan lainnya. Perwujudannya adalah sikap menghormati sesama. Dengan begitu, manusia akan menghargai kata-kata yang diucapkannya. "Orang yang sampai pada hakikat *ati macinnong*, hati yang bersih, seujung rambut pun tidak akan punya kebencian kepada orang lain. Lebih dari itu, tidak punya waktu untuk memfirnah, bertengkar, dan bermusuhan".

Bagi Zawawi, *ati macinnong*, itu bisa dikembangkan ke luar Makassar-Bugis, melampaui wilayah Sulawesi Selatan. Ia menyebut, spirit *ati macinnong* bisa go nasional dan internasional yang pada akhirnya akan menjadi akal sehat kolektif. Akal kolektif insya Allah akan sangat berharga untuk memperbaiki keadaan di Indonesia sebagai tanah air yang indah. Kalau ingin kehidupan negeri ini indah dan tetap makmur, serta rakyatnya ingin sejahtera, orang-orangnya harus memiliki *ati macinnong* dan hati yang indah. *Ati macinnong* ini menjaga badik atau senjata nilai-nilai.¹⁷

¹⁶ Dedi Djubaedi, *membangun Kerukunan Umat Beragama Melalui kerifan Lokal*, Makalah (kepala Puslitbang Kejidupan Keagamaan) di Jakarta 27 November 2013

¹⁷D. Zawawi Imron, *Sastrawan, Harian Fajar*, Desember 2013

Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya warga Bugis-Makassar, sejak dahulu telah memiliki sekumpulan nilai yang diwarisi yang dikenal dengan budaya Siri'. Sistem nilai budaya Siri' merupakan nilai utama. Nilai Siri' dimaknai sebagai suatu yang sangat berharga dan dijunjung tinggi oleh orang Bugis Makassar. Nilai Siri' member warna bagi kehidupan masyarakatnya. Nilai Siri' sebagai nilai utama harus dipandang sebagai nilai-nilai yang utuh dan mempunyai dua sisi, ibarat mata uang; harganya terletak pada dua sisinya. Satu dari padanya hilang tidak berhargalah ia.

Rahman Rahim mengemukakan bahwa; "Menurut Toriolo nilai utamalah yang menentukan seseorang disebut manusia. Maksudnya bahwa ketika berfungsi dan berperannya sifat-sifat kemanusiaan, sehingga orang menjadi manusia, demikian halnya dengan nilai-nilai Siri' seperti nilai *lempu'* (kejujuran), *acca* (kecendekiaan), *sitinaja* (kepatutan), *getting* (ketegasan), dan *reso* (ketekunan atau usaha) harus jelas peranannya pada kegiatan-kegiatan, baik di kalangan individu maupun institusi kemasyarakatan.

Agama Islam menyebar pada komunitas yang umumnya telah memiliki tradisi atau adat - istiadat yang sudah berakar dan diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Islam ketika berhadapan dengan adat yang sudah mapan dituntut menunjukkan kearifannya. Islam dalam realitasnya mampu menampakkan kearifannya, islam adalah rahmat bagi seluruh alam, yang ditandai dengan pendekatan dakwah secara damai dan bertahap, bukan sebaliknya dengan secara frontal, sporadis disertai kekerasan. Singkatnya, Islam mampu berdialektika secara harmonis dengan kemajemukan adat dan memberikan klarifikasi secara bijaksana terhadap unsur-unsur adat yang bernilai positif dan bisa dipelihara dan unsur-unsur adat yang bernilai negatif yang perlu ditinggalkan. Dengan demikian, kehadiran agama Islam bukan untuk menghilangkan adat dan budaya setempat, melainkan untuk memperbaiki dan meluruskannya menjadi lebih berperadaban dan manusiawi.

Jauh sebelum era kemerdekaan, masyarakat Indonesia telah memiliki sistem sosial-budaya yang sangat khas, yang berbeda-beda satu etnis dengan etnis yang lain. Setiap komunitas lokal yang terdapat di Nusantara mempunyai sistem nilai dan norma tersendiri yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga tercipta suatu pola kehidupan mekanistik dalam masyarakat. Sistem nilai dan norma itu biasanya mendorong interaksi sosial yang intens, perasaan kebersamaan, kerjasama, dan kedamaian. Ini semua merupakan suatu kearifan lokal yang menjadi kekayaan budaya Indonesia. Sistem sosial-budaya tersebut telah tumbuh dan berkembang dari generasi ke generasi, seolah-olah bertahan dan berkembang dengan sendirinya. Kearifan lokal tersebut telah terpelihara dan tumbuh dalam masyarakat itu sendiri.

Adapun kondisi kehidupan keagamaan kita di Indonesia ini, pertamanya tentu saja diwarnai oleh adanya perbedaan-perbedaan dalam pemeluk agama, etnis, dan budaya yang selanjutnya membangun pengelompokan masyarakat berdasarkan pemeluk agama itu. Lebih dari itu, kondisi kehidupan keagamaan kita sesungguhnya juga ditandai oleh berbagai faktor sosial dan budaya, seperti perbedaan tingkat capaian pendidikan para pemeluk

agama, perbedaan tingkat sosial ekonomi para pemeluk agama, perbedaan latar belakang budaya, serta perbedaan suku dan daerah asal. Sistem sosial-budaya tersebut dipelihara dan dipertahankan setiap etnis.

Pada dasarnya, sistem sosial-budaya merupakan perwujudan dari kontrak sosial masyarakat yang terbentuk sedikit demi sedikit yang terus menguat hingga menjadi tatanan yang mengikat. Kontrak-kontrak sosial serupa terwujud secara alamiah sesuai dengan tuntutan sosial di zamannya. Boleh jadi, ia merupakan sistem budaya, agama, semangat modernisasi yang diciptakan oleh aktor-aktor lokal melalui proses yang berulang-ulang. Setiap sistem sosial-budaya yang terwujud dari kontrak sosial tersebut memiliki ciri khas sendiri-sendiri atau yang disebut dengan "sense of authonomy".

Sense of authonomy komunitas adat lokal yang berkembang sejak dulu meliputi cakupan yang cukup luas. Umumnya, komunitas adat memiliki ciri khas sendiri dalam seni tari, nyanyian, ukiran, rumah adat, pakaian adat, upacara perkawinan, sistem kekerabatan, struktur sosial, tata cara musyawarah, tata cara membangun sarana dan fasilitas umum, tata cara penyelesaian konflik, etos kerja, sistem kepercayaan, tata cara ritus atau penyembahan kepada yang gaib, paradigma berfikir masyarakat, dan pandangan hidup. Semua yang menjadi *sense of authonomy* yang dimiliki komunitas adat menjadi kearifan lokal (*lokal wisdom*) bagi komunitas tersebut. Potensi kerukunan yakni terdapat budaya dan kearifan - kearifan setempat. Setiap suku atau komunitas memiliki nilai luhur tersendiri baik yang mereka adopsi dari ajaran agama maupun tradisi dari nenek moyang.

Kearifan lokal merupakan suatu istilah yang mengacu ke permukaan dengan mengadopsi prinsip, nasihat, tatanan, norma, dan perilaku leluhur kita masa lampau yang masih sangat urgen untuk diaplikasikan dalam menata berbagai fenomena yang muncul. Kearifan lokal tidak terlepas dari kearifan budaya setempat. Istilah kearifan, biasanya dikenakan pada masalah lingkungan, yaitu hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Manusia berperang ganda, yaitu sebagai subjek yang mempengaruhi lingkungan dan sebagai objek yang dipengaruhi lingkungannya. Kearifan berarti kebijakan (*wisdom*) mengelola alam, agar lingkungan tetap lestari.

Keberadaan kearifan-kearifan lokal yang memiliki peran signifikan. Oleh karena itu, keberadaan kearifan lokal sudah sepantasnya mendapat perhatian untuk dikembangkan menjaga kerukunan hidup umat beragama. Jika dicermati, budaya lokal pada umumnya, dan budaya lokal masyarakat Bugis-Makassar pada khususnya telah banyak memberikan inspirasi dalam kehidupan masyarakat terkait kerukunan hidup antar umat beragama.

Kearifan di dalam masyarakat lokal ada yang berupa tradisi dan praktek terbaik (*best practice*) yang terjelma dalam tingkah laku, dan ada pula yang dalam bentuk ungkapan-ungkapan dan pesan-pesan. Tradisi lisan dalam bahasa lokal merupakan sarana utama penerusan pesan-pesan tersebut dari generasi ke generasi. Ketika tradisi lisan mulai terdesak oleh ruang ekspresi yang dipenuhi budaya populer, masih ada harapan ke tradisi tulisan yang

masih tersisa. Lontarak berjasa sebagai media pelestarian kearifan-kearifan lama, meski tidak semua materi kearifan itu terekam dalam tulisan.¹⁸

Menurut Halilintar Lathief bahwa; selain sumber tertulis Lontara' juga masih banyak sumber lisan yang memuat pesan leluhur tentang bagaimana orang Bugis harus berintegrasi. Dalam bahasa Bugis pesan-pesan tersebut disebut pappaseng, yang kadang ada yang dinyanyikan, ada yang diceritakan berupa *pau-pau* (dongeng).

Cukup banyak orang bijak (filosof) Bugis dan Makassar yang masih dikenal dan digunakan ajarannya hingga kini. Beberapa di antaranya adalah: (1) Kajaolalido, (2) Toliung Maccae ri Luwu, (3) Nene Mallomo, (4) Arung Bila, (5) Puang ri Maggalatung, (6) Ammana Gappa, (7) Bontolempangang, dan sebagainya. Kadang ada juga pesan yang lama disebut sumbernya dari Torioloe.

Sumber tertulis Lontara' Bugis juga banyak memuat pesan leluhur tentang bagaimana orang Bugis harus berintegrasi dengan Tuhan, manusia, dan alam, Lontara'Bugis Sukkukna Wajo misalnya, memuat pesan tentang manusia yang harus menghemat dan taat pada peraturan sebagai dinyatakan sebagai berikut: "Napoalebbirengngi to Wajo'e makkeadek e, naparekki waranparanna". Terjemahnya: Yang menjadikan orang Wajo mulia ialah karena mereka taat pada Hukum Adatnya dan memelihara serta menghemat harta bendanya.

Salah satu kearifan lokal orang Bugis yakni Siri' , oleh Abu Hamid dikatakan bahwa penting untuk melakukan reinterpretasi terhadap makna Siri".Reinterpretasi makna Siri' untuk revitalisasi adalah berguna bagi pengembangan peradaban dalam pergaulan global. Oleh karena berfungsi mendorong motivator, sosial kontrol, rasa tanggung jawab dan dinamisator sosial. Kalau Siri' merupakan taruhan harga diri, maka harga diri tersebut harus diangkat melalui kerja keras, berperestasi, berjiwa pelopor dan senantiasa berorientasi keberhasilan. Harga diri terangkat atas dukungan rasa Pesse (Bugis) atau Pacce (Makassar), yairu solidaritas terhadap orang lain sebagai partisipasi sosial, karena penilaian harga diri datang dari h'ngkungan sosial. Pesse adalah iba had melihat sesama warga yang mengalami penderitaan atau tekanan batin atas perbuatan orang lain dan sejenisnya. Siri" dan Pacce adalah dua sikap moral yang menjaga stabilitas dan berdimensi harmonis, agar tatanan sosial atau pangadereng (adat - istiadat) berjalan secara dinamis. Dalam hubungan dengan fenomena sosial, verbalisasi Siri" berupa ungkapan tema-tema budaya, seperti mate siri", tabbe siri', siri' riale dan ungkapan lainnya, adalah sikap pribadi dan sosial yang mengandung resiko bilamana terlantar. Oleh karena itu, tutur kata yang sopan, gaya perilaku menurut posisi tanpa arogan, saling Sipakatau (menghormati sesama manusia), merupakan bagian dari pembentukan stabilitas. Dalam kata lain, bahwa konsep Siri' dalam kebudayaan, adalah merupakan eksistensi manusia di atas segala-galanya.

¹⁸Abd. Kadir Ahmad, *Sinerjitas Kearifan Lokal Sulawesi Selatan dengan Pembangunan Kerukunan Umat Beragama*, (Makalah), 28 November 2013, h. 1.

Dalam Lontara' disebutkan " Ada empat tanda-tandanya orang yang baik budi pekertinya: (1) mengeluarkan kata-kata yang benar (tepat); (2) menyusun kata secara teratur dan pantas; (3) menyambut kata dan mengungguli (mengalahkan) ; (4) menyusun kata, menyelusuri pembicaraan, dan tidak ketinggalan. Agar setiap orang yang ikut dalam diskusi, pembicaraan, hendaknya berusaha menggunakan kata dan istilah yang tepat mengenai sarannya agar dapat meyakinkan orang lain yang mendengarkan kebenarannya." Orang yang memenuhi kriteria semacam ini dalam tradisi Makassar adalah orang yang paham dan menghormati pangadakkang. Makin tinggi sopan santunnya, maka makin tinggi wibawa dan penghargaan orang terhadapnya. Oleh karena itu, setiap manusia Makassar selalu berusaha memelihara pangadakkang, agar seluruh tingkah laku dan ucapannya (gauk na kana-kanana) harus dipandang pantas dan mulia atau anggun. Berikut beberapa aturan sopan santun dalam pergaulan orang Makassar yang dinampakkan dalam gerak sikap dan tutur bahasa mereka.

1. Pada pertemuan-pertemuan, tidak boleh ikut bersuara kalau tidak ditanya. Kalau terpaksa memberi penjelasan terlebih dahulu ia minta izin dengan ucapan takupolong bicaranta (berbicara tanpa ditanya), lalu ia mengeluarkan pendapat.
2. Menghindari lewat di depan orang, kalau terpaksa harus lewat dengan membukukkang diri, mengayun tangan kanan ke depan dengan-mengucapkan kata-kata tabek lombo (beribu pennisi).
3. Duduk dihadapan orang yang dihormati harus assulengka (bersila), kalau duduk bersama orang dihormati tidak boleh berdiri lebih dahulu atau mengubah duduk.
4. Seorang laki-laki kalau makan harus memakai penutup kepala (songkok) dan memakai lipak (sarung).
5. Bila kedatangan tamu harus menerimanya dengan pakaian rapi. Apabila sedang duduk, berdiri dahulu kemudian duduk kembali sebagai penghormatan.
6. Seorang perempuan tidak boleh berlaku keras memperdengarkan suara atau ketawanya.
7. Bila makan bersama orang yang dihormati, tidak boleh mendahului selesai makan.

Tata cara menyampaikan pendapat dengan sopan dan beradab di atas, hanyalah sebuah contoh dari sekian banyak khazanah budaya nusantara yang telah lama ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia.¹⁹

Sejarah budaya, memang siri' ini pernah mendorong dinamika masyarakat pada masa pemerintahan raja-raja dan masa perjuangan kemerdekaan. Sistem budaya itu diterima oleh setiap orang atau kelompok masyarakat dari hasil perkembangan kebudayaannya. Sadar atau tidak sadar, manusia dipengaruhi dan menerima berbagai warisan, ajaran, kepercayaan,

¹⁹ Halilintar Lathtief, *Makalah*, Makassar 28 November 2013, h. 15.

interaksi, dan hasil kerja kelompoknya melalui internalisasi dan sosialisasi sejak dari dalam rumah tangganya sampai pengaruh lingkungan masyarakatnya di mana manusia tersebut bertumbuh. Demikianlah, masyarakat Sulawesi Selatan terdapat empat suku bangsa: seperti suku bangsa Bugis, Makassar, Toraja, dan suku bangsa Mandar, masing-masing mempunyai keunikannya sendiri, di samping persamaan-persamaannya. Kebudayaan itu tersimpan dalam kelompok suku bangsa (etnik) dengan segala sistem-sistem sosial yang dimilikinya, di samping nilai-nilai dan gagasan yang terbentuk atas pengaruh kesejahteraan dan ekosistem lingkungannya.

Masyarakat sudah menyadari bagaimana pentingnya peran kearifan lokal dalam beraktivitas dalam segala lapangan dan sektor kegiatan sosial. Oleh Abd. Kadir Ahmad dikemukakan sebagai berikut: Kearifan lokal membuka mata ke dalam nuansa kehidupan yang dicita-citakan oleh generasi pendahulu. Meski dilihat dari segi waktu kearifan itu merupakan bagian dari masa lampau, pesan-pesan yang dikandungnya tetap aktual menembus ruang dan waktu.

Materi yang terkandung dalam kearifan lokal, sebagaimana tertuang dalam rapang, merupakan akumulasi nilai sepanjang sejarah orang Sulawesi Selatan, sehingga tidak relevan lagi untuk mengurai apakah itu berasal dari khazanah budaya sebelum agama besar masuk atau bagian dari ajaran agama, khususnya Islam. Selain karena tidak mudah menelusuri kembali relung sejarah yang demikian panjang, juga karena nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan itu merupakan nilai-nilai universal bagi manusia beradab.

Membangun kerukunan hidup umat beragama adalah suatu kemestian. Menuju kepada kebenaran adalah ciri dari masing-masing agama. Sepanjang itu terbentuk pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama setiap orang tidak sewajarnya berfikir untuk memutlakkan pendapat. Sepantasnya masing - masing penganut agama rela hidup berdampingan dan bekerja sama untuk membangun masyarakat. Oleh karena program membangun masyarakat ini adalah kepentingan bersama, maka bentuk-bentuk kerja sama itu hendaknya dimulai dari hal-hal yang konkret yang dapat dirasakan oleh semua orang tanpa memandang latar belakang agama dan budayanya.

Konsep memanusiakan manusia sudah dimiliki orang Bugis sejak lama dengan sebutan sipakatau. Kata itu bermakna saling memandang manusia adalah manusia dengan segala individualitasnya, pandangan dan kepercayaannya, harus dihormati. Akar kata *sipakatau* adalah tau yang dapat awalan paka dan imbuhan si. Kata tau, dikenal oleh empat suku bangsa di Sulawesi Selatan, seperti Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja.

Konsep sipakatau, dipahami oleh anggota masyarakat dalam praktik kehidupan sehari-hari, adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban pada semua jenjang posisi-posisi sosial. Ketimpangan antara hak daripada kewajiban, dirasakan sebagai suatu ketidakadilan. Jadi sipakatau bersifat universal, sama halnya hak asasi manusia itu sendiri. Debat panjang dalam sejarah peradaban, mulai dari teori hukum alam, teori positivitas, relativitas budaya sampai pada pemikiran ideologis, meneguhkan kepercayaan kita bahwa gagasan tentang hak asasi manusia atau *sipakatau*, mutlak harus

ditegakkan sebagai makhluk termulia dari semua makhluk yang ada di atas planet bumi ini. Kasih sayang adalah salah satu unsur sipakatau, disebarkan kepada sesama, terutama yang memerlukannya.

V. Penutup

Kota Makassar adalah ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan didiami oleh berbagai suku bangsa yang sudah barang tentu mempunyai adat, budaya, kepercayaan, dan agama yang berbeda-beda. Mereka dapat hidup rukun dan damai dalam membangun Kota Makassar dengan penuh kekeluargaan. Agama berperan sebagai penggerak dan landasan motivasi kerja sehingga setiap gerak langkah dari setiap orang yang beriman menyadari bahwa ia memikul misi untuk mengangkat harkat kemanusiaan.

Kerukunan umat beragama terkadang terganggu karena terjadinya kesalah pahaman, baik secara antar umat beragama, maupun intern umat beragama itu sendiri. Keadaan masyarakat di Kota Makassar yang berbeda suku, adat, kepercayaan dan agama inilah yang menjadi hal penting. Di Makassar ada berbagai suku yang ada; misalnya ; Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja, demikian juga agama, yakni; agama Kristen Katholik, Agama Kristen Protestan, Agama Hindu, Agama Budha, Agama Konghucu dan Agama Islam. Pemeluk agama yang disebut terakhir adalah merupakan penduduk yang dominan mendiami Kota Makassar ini.

Kearifan lokal di Kota Makassar yakni Sipakatau, Sipakalebbi, akan menjadi perekat kerukunan umat beragama, oleh karena itu perlu dilestarikan. Salah satu bukti yang mungkin diambil sebagai contoh ialah kehidupan masyarakat di Tanah Toraja yang dipersatukan dan diikat oleh budaya lokal setempat yakni budaya Solata. Mereka tinggal bersama dalam satu rumah tangga dimana mereka berbeda agama, dapat hidup aman dan tenteram. Boleh jadi di Kota Makassar ini juga terjadi hal yang demikian itu, namun untuk meyakinkan kebenarannya perlu suatu penelitian yang tersendiri.

Usaha seperti di atas adalah suatu bukti kongkrit bahwa kearifan lokal dapat memberikan kontribusi positif dalam memelihara kerukunan umat beragama dan mencegah terjadinya konflik khirsusnya di Kota Makassar.

Daftar Pustaka

Menteri Agama, K.H. M. Dachlan, dalam pidato pembukaan *Musyawarah Antaragama* tanggal 30 November 1967 di Jakarta.

Journal of Religious Issues (Yogyakarta: UGM, 2003) h. 129.

Alamsyah Ratu Perwira negara, *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, (Jakarta: Departemen Agama, 1982), h. 12

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian rumah Ibadat.

Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kementerian Agama, *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama; Dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*. (Get. Pertama, Jakarta: Pen; Maloho Jaya Abadi Press, 2010).

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 pasal 9 ayat 2.

Dedi Djubaedi, *membangun Kerukunan Umat Beragama Melalui kerifan Lokal*, Makalah (kepala Puslitbang Kejidupan Keagamaan) di Jakarta 27 November 2013